

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiptudence)*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azar Usman, *Perlindungan Hukum dan Penempatan Tenaga kerja Indonesia*, Jurnal Mimbar, 2007.
- Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra. Aditya Bakti, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Jakarta; :Penerbit buku Kompas 2007.
- G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Hadjon, Pjillipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- _____, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni, 2004.

- J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Cetakan ke 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Rika Refianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjadara, Yogyakarta, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____, *Efektivitas hukum dan peranan saksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985.
- _____, *Penegakan hukum*, Bandung: 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 36/06/17/II, 2 Juni 2017.

Situs Internet :

<http://info-kotakita.blogspot.co.id/2013/09/wilayah-kota-bengkulu.html>

<http://www.indonesianotarycommunity.com/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-Notaris/>, Syafran Sofyan.

<http://www.seputarukm.com/pembangunan-ekonomi-di-indonesia-tahun-tahun-terakhir>, 22 Februari 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21201/ketika-notaris-dipanggil-polisi>.

<http://www.ptpn5.com>, Muhammad Fajri, *Prespektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*.

www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf, Nurul Hakiim, *Efektivitas pelaksanaan sistem arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungannya dengan lembaga Peradilan*.

www.hukumonline.com, *Pemeriksaan Notaris tak perlu persetujuan MPD*.

www.indonesianotarycommunity.com, *Majelis Kehormatan Notaris*.

<http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2017/03/18/walikota-beberkan-kemajuan-kota/>.

Bengkulu.kemenkumham.go.id/attachments/article/551/DATABASE%20NOTARIS%20PROVINSI%20BENGKULU.pdf

Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1945 tentang Jabatan Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta : PT. Gramedia, 2012.

Mohammad Zain, J. S. Badudu-Sutan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusraka Sinar harapan, 1984.